Pendekatan Pluralisme Liberal, *Middle Powers*, dan Opini Publik dalam Membangun Hubungan Indonesia-Australia di Era Prabowo-Albanese

Harry Darmawan¹, Gulia Ichikaya Mitzy*²

^{1,2} Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia

e-mail: ¹hdarmawan@civitas.unas.ac.id, *²guliaichikayamitzy@civitas.unas.ac.id

Abstract

This article analyses the prospects of bilateral relations between Indonesia and Australia under the leadership of President Prabowo Subianto and Prime Minister Anthony Albanese. Utilising liberal pluralism theory and the concept of middle powers, this article highlights three main domains that have the potential to strengthen cooperation between the two countries: economy, security, and public opinion. The Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) is a form of liberal pluralism approach that supports the participation of various actors in strengthening bilateral economic relations. In the security field, the status as middle powers allows Indonesia and Australia to play a significant role in maintaining the stability of the Indo-Pacific region through multilateral diplomacy although each country has a different approach in addressing geopolitical dynamics. Public opinion also influences the relationship between the two countries. Through efforts to increase public understanding and reduce negative stereotypes, the relationship between Indonesia and Australia has the potential to be stronger and more stable in the future. The conclusion shows that through economic commitment, strategic partnership in security, and public support, both countries have a solid foundation to build a mutually beneficial bilateral relationship.

Keywords — Anthony Albanese, IA-CEPA, Liberal pluralism, Middle powers, Prabowo Subianto, Public opinion

Abstrak

Artikel ini menganalisis prospek hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anthony Albanese. Memanfaatkan teori pluralisme liberal, konsep *middle powers*, artikel ini menyoroti tiga ranah utama yang berpotensi mempererat kerja sama kedua negara, yakni ekonomi, keamanan, dan opini publik. Perjanjian *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) menjadi bentuk pendekatan pluralisme liberal yang mendukung partisipasi berbagai aktor dalam memperkuat hubungan ekonomi bilateral. Di bidang keamanan, status sebagai *middle powers* memungkinkan Indonesia dan Australia untuk memainkan peran signifikan dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik melalui diplomasi multilateral meskipun masing-masing negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyikapi dinamika geopolitik. Opini publik turut memengaruhi hubungan kedua negara. Melalui upaya peningkatan pemahaman publik dan penurunan stereotip negatif, hubungan Indonesia dan Australia berpotensi lebih kuat dan stabil pada masa mendatang. Kesimpulan menunjukkan bahwa melalui komitmen ekonomi, kemitraan strategis dalam keamanan, serta dukungan publik, kedua negara memiliki landasan kokoh untuk membangun hubungan bilateral yang saling menguntungkan.

Kata kunci — Anthony Albanese, IA-CEPA, *Middle powers*, Opini publik, Pluralisme liberal, Prabowo Subianto

1. Pendahuluan

Tahun 2024 merupakan periode yang cerah bagi hubungan Australia-Indonesia. Hal ini tercermin dalam intensitas saling kunjung antara pejabat tinggi Australia dan pejabat tinggi pemerintahan Indonesia yang cukup tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Salah satu kunjungan bersejarah pejabat tinggi Australia ke Indonesia terjadi pada bulan Mei 2024, ketika Gubernur Jenderal Australia, David Hurley, datang dan tinggal di Indonesia selama tiga hari sejak 14-17 Mei 2024. Kunjungan pejabat negara tertinggi Australia ini merupakan balasan atas kunjungan Presiden Joko Widodo pada tahun yang sama.

Dalam siaran media yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Australia di Jakarta, kedatangan David Hurley ini dalam kapasitas untuk meningkatkan keeratn hubungan bilateral Australia-Indonesia, khususnya dalam kerja sama pertahanan keamanan (Australian Embassy, 20 Mei 2024). Pentingnya isu keamanan tersebut dapat ditelaah melalui pertemuan-pertemuan yang diinisiasi David Hurley dalam lawatannya ke Indonesia yang didominasi dengan pertemuan bersama Kementerian Pertahanan Indonesia, Alumni Ikatan Pertahanan Australia-Indonesia (IKAHAN), dan beberapa pejabat tinggi militer Indonesia. IKAHAN sendiri merupakan organisasi yang turut diinisiasi oleh David Hurley ketika masih aktif menjadi pejabat tinggi Angkatan Bersenjata Australia (Australian Embassy, 20 Mei 2024).

Pertemuan lain yang tak kalah strategis juga terjadi di bidang ekonomi dengan Menteri Koordinator Ekonomi Indonesia, Airlangga Hartarto, yang dibalut dalam lingkup perayaan 75 Tahun Hubungan Bilateral Australia-Indonesia. Salah satu tonggak penting dalam memodernisasi hubungan bilateral keduanya yakni penandatanganan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) pada tahun 2020 (Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian Republik Indonesia, 16 Mei 2024). Perjanjian penting tersebut telah membuka jalan baru untuk perdagangan dan investasi. Sejak saat itu, telah terjadi peningkatan volume perdagangan sebesar 90%, yang merupakan bukti nyata dari dampak positif perjanjian ini terhadap perekonomian Indonesia. Australia merupakan mitra yang berkembang bagi Indonesia. Pada tahun 2023, *Foreign Direct Investment* Australia tumbuh sebesar 4,0%, atau setara dengan USD545,2 juta. Jumlah investasi proyek meningkat lebih dari 200% (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 16 Mei 2024).

Kunjungan pejabat pemerintahan Australia ke Indonesia, selain dilakukan oleh David Hurley sebagai Gubernur Jenderal Australia, juga dilakukan oleh pejabat tinggi lainnya setingkat Menteri, termasuk oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles. Dalam kunjungan ke Indonesia pada 28-29 Agustus 2024 ini, Richard Marles direncanakan akan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertahanan Australia-Indonesia, bersama Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto (Antara News, 29 Agustus 2024). Penandatanganan Kerja Sama Pertahanan Australia-Indonesia ini tentu merupakan prestasi tersendiri bagi kedua belah pemerintahan, dan termasuk dalam upaya strategis Australia-Indonesia dalam menghadapi dinamika internasional saat ini yang sangat riskan, terutama di kawasan Eropa dan Timur Tengah.

Tidak hanya pejabat penting Australia yang pada tahun 2024 intens datang ke Indonesia, pada sisi lain Presiden Joko Widodo, para Menteri, dan bahkan presiden terpilih, Prabowo Subianto pun menyempatkan datang secara khusus ke Australia, dan disambut langsung oleh Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, di Canberra. Secara meyakinkan, Prabowo Subianto mengajak Australia untuk

melanjutkan hubungan bertetangga ini untuk lebih baik lagi dari masa-masa sebelumnya. Prabowo Subianto yang saat itu mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia menyatakan:

“Hubungan persahabatan diantara kita sangat saya hargai karena Indonesia selalu ingat bahwa Australia adalah salah satu negara yang pertama mendukung perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia di tahun 40-an,” tutur Menhan Prabowo. *“Saya bertekad akan melanjutkan hubungan bertetangga ini lebih baik lagi,”* sambungnya (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 20 Agustus 2024).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Subianto secara khusus juga mendapatkan sesi diskusi yang cukup mendalam dengan Perdana Menteri Anthony Albanese dan para menteri-menterinya. Hadir pula beberapa pejabat tinggi Australia di antaranya *Minister for Foreign Affairs Senator the Hon Penny Wong*, *Treasurer The Hon Dr. Jim Chalmers M.P.*, *Minister for Home Affairs The Hon Tony Burke M.P.*, *Minister for Climate Change and Energy The Hon Chris Bowen M.P.*, *Minister for Agriculture, Fisheries and Forestry The Hon Julie Collins M.P.*, *Minister for Resources The Hon Madeleine King M.P.*, *Minister for Industry and Science The Hon Ed Husic M.P.*, serta *Australian Ambassador to Indonesia H.E. Ms. Penny Williams PSM* (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 20 Agustus 2024).

Pada 23 Mei 2022, Anthony Albanese resmi menjadi Perdana Menteri Australia ke-31. Ia telah berjanji untuk memprioritaskan hubungan dengan Indonesia dan menyatakan bahwa dari semua negara ASEAN, Indonesia adalah

perhatian Utama. Ia berjanji akan memperbarui dan memperbaiki hubungan dengan Indonesia. Ia menaruh perhatian terhadap bagaimana Indonesia merespons pembentukan AUKUS yang disetujui pemerintahan sebelumnya pada 2021. Meskipun, dalam bayangannya Indonesia adalah negara tetangga yang penting, opini publik Australia terhadap Indonesia masih kurang baik. Survei tahun 2016 menunjukkan bahwa 47% warga Australia memiliki pandangan tidak bagus tentang Indonesia. Pada tahun 2020, 58% warga Australia tidak setuju bahwa Indonesia adalah demokrasi. Sementara, dari Survei Lowy Institute tahun 2022 terlihat bahwa kepercayaan warga Indonesia terhadap Australia telah turun drastis dalam dekade terakhir. Hanya 55% warga Indonesia yang menyatakan kepercayaan, turun 20 poin dari tahun 2011 (Department of International Relations Faculty of Psychology and Socio-Cultural Sciences, 6 Mei 2022).

Dari sudut pandang kekuatan negara, Australia dan Indonesia menempatkan dirinya sebagai *middle powers* (kekuatan menengah). Australia adalah kekuatan besar di Oseania, sedangkan Indonesia adalah kekuatan besar di ASEAN. Namun, dalam peta geopolitik internasional, keduanya belum mencapai taraf *super powers* (adidaya). Keduanya juga tak termasuk *small power* (kekuatan kecil). *Middle powers* adalah konsep untuk mengategorikan negara yang tak termasuk *super powers* dan *small powers*. Kedua negara mempunyai ciri khas untuk menggapai kepentingannya ketika berada dalam konstelasi politik dunia bersama *super* dan *small powers*. Kesamaan kategori ini menjadi modal penting bagi Australia dan Indonesia dalam membangun hubungan pada tahun-tahun mendatang.

Australia dan Indonesia juga menganut prinsip demokrasi. Tradisi demokrasi di Australia berkembang lebih panjang daripada demokrasi di Indonesia. Australia telah menjadi negara demokrasi sejak pembentukan federasi Australia pada 1901. Indonesia memang telah menganut prinsip demokrasi sejak kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, tetapi perjalanan demokrasi mengalami pasang surut seperti pada era Orde Lama Sukarno (1959—1966) dan Orde Baru Soeharto (1966—1998). Setelah era Soeharto yang disebut era Reformasi, Indonesia berupaya menegakkan kembali prinsip negara demokrasi yang menekankan pentingnya pembagian kekuasaan dan keterlibatan berbagai pihak dalam kebijakan politik dalam dan luar negeri. Penekanan ini berlandas pada konsep pluralisme liberal.

Paparan di atas telah menunjukkan bahwa hubungan Australia-Indonesia menjadi kasus yang menarik untuk dianalisis. Karakteristik pemerintahan baru di Australia dan Indonesia akan menentukan bagaimana arah hubungan kedua negara. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana prospek hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia pada masa pemerintahan Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Albanese dengan mempertimbangkan teori pluralisme liberal, konsep *middle powers*, dan pengaruh opini publik. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Australia-Indonesia bila dilihat dari kondisi dunia internasional sezaman dan tekanan-tekanan dari negara-negara besar terhadap sikap politik internasional negara Kanguru dan Garuda ini.

2. Tinjauan Literatur

Penelaahan hubungan bilateral Australia-Indonesia termasuk dalam kajian hubungan internasional yang memasukkan tak hanya fakta-fakta pada masa sekarang, tapi juga fakta-fakta sejarah yang membentuk keputusan-keputusan sebuah negara dalam menempuh kebijakan politik luar negerinya. Jill Steans dan Lloyd Pettiford mengemukakan setidaknya lima karakteristik dalam arus utama pendekatan liberalisme, dengan diantaranya adalah rasionalitas, kepentingan, kerja sama, keberadaan pemerintah yang tidak sentralistik, dan kebebasan individu (Steans & Pettiford, 2009: 100).

Lima karakteristik utama liberalisme ini pada era kekinian tidak lagi berlaku secara tunggal, namun terjadi saling pengaruh-memengaruhi satu sama lain, yang berujung pada interaksi faktor-faktor berpengaruh tersebut. Salah satu yang dapat kita tarik adalah bagaimana peran pemerintah yang awalnya dianggap sebagai ancaman, namun kemudian bertransformasi menjadi lebih kompleks.

Salah satu pemikir liberal abad XIX, John Stuart Mill, berpandangan bahwa pemerintah kini merupakan ancaman yang diperlukan untuk melindungi kebebasan individu. Namun, Mill juga melihat kekuasaan pemimpin politik atau aparat pemerintahan perlu dibatasi untuk menghindari tirani. Karena itu, Mill menyarankan adanya *check & balance* yang menjamin tak ada aktor politik atau aparat pemerintah yang mendominasi (Steans & Pettiford, 2009: 107-108). Ide ini kemudian disebut sebagai pluralisme liberal yang berarti kekuasaan tak berpusat di satu aktor, melainkan terbagi ke beberapa aktor dan lembaga pemerintahan.

Dalam konteks hubungan Australia-Indonesia, konsep pluralisme liberal turut memengaruhi arah hubungan Australia-Indonesia. Konsep ini tak hanya menempatkan

pemerintahan sebagai aktor utama pembuat kebijakan luar negeri, tapi juga kekuatan lain seperti lembaga internasional, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil.

Hal ini tampak dalam sejumlah perjanjian yang dibuat oleh Australia-Indonesia dalam empat tahun terakhir. Perjanjian itu antara lain *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) pada tahun 2020. Perjanjian ini tidak hanya melibatkan pemerintah kedua negara, tetapi juga mengikutsertakan aktor ekonomi lainnya. Selain perjanjian tersebut, ada pula perjanjian Kerja Sama Pertahanan Australia-Indonesia pada Agustus 2024 yang mencerminkan keterlibatan lembaga penelitian pertahanan dan perusahaan industri pertahanan.

Penelaahan prospek hubungan Australia-Indonesia ini juga menggunakan pendekatan teori *middle powers* (kekuatan menengah). Konsep ini merujuk pada negara-negara yang tidak berkategori *super power* (adidaya), tapi juga bukan negara *small power* (kekuatan kecil). Pengategorian ini melihat perbedaan kekuatan pada masing-masing negara seperti posisi negara, identitas negara, dan perilaku negara (Hanggarini et al., 2023: 2).

Posisi negara merujuk pada kemampuan negara berdasarkan ukuran wilayah, sumber daya, kepemimpinan, dan kekuatan militer. Identitas negara berkenaan dengan kemampuan negara mengidentifikasi diri dengan *small power* dalam tatanan dunia. Perilaku negara menekankan pada kebijakan politik luar negeri sebuah negara untuk mengejar kepentingan mereka dan membatasi kekuatan *super powers*.

Prospek hubungan Australia-Indonesia juga mendapat pengaruh dari opini publik. Publik Australia mempunyai pandangan beragam tentang Indonesia, begitu pula dengan Indonesia. Danielle Chubb dan Ian McAllister menggambarkan perubahan pola opini publik Australia terhadap isu-isu pertahanan dan luar

negeri sejak pertengahan abad ke-20 (Chubb & Macallister, 2021: 138-142). Ia mencatat bahwa opini publik dapat memengaruhi kebijakan pemerintah Australia terhadap Indonesia.

Sama halnya dengan Australia, persepsi publik Indonesia juga dapat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah Indonesia terhadap Australia. Philips Kitley, Richard Chauvel, dan David Reeve pernah merangkum sejumlah artikel pers Indonesia yang membahas Australia dalam rentang 1973—1988. Media massa telah menjadi faktor yang berpengaruh dan dinamis dalam hubungan Indonesia-Australia (Kitley et al., 1989: xiii).

Pada masa sekarang, media masih berperan dalam membentuk opini publik. Media sekarang tak sebatas lagi berbentuk wahana cetak, tapi juga digital. Pemberitaan media tentang hubungan kedua negara berperan dalam melahirkan opini publik. Untuk membaca bagaimana opini publik dari kedua negara, lembaga survei EY Sweeney, pada 2022, mencoba mengadakan survei tentang hubungan Australia-Indonesia (Department of International Relations Faculty of Psychology and Socio-Cultural Sciences, 6 Mei 2022).

3. Metode Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti dalam paparan di atas, maka bentuk penelitian ini mengambil sumber data kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan menggunakan berbagai sumber referensi berupa literatur buku-buku, hasil penelitian, publikasi pemerintah, artikel jurnal, surat kabar, catatan internal lembaga, dan situs internet.

Sementara dari segi analisisnya, penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analitis yang bertujuan

untuk menggambarkan dan menganalisis dinamika hubungan Indonesia dan Australia, khususnya berbagai faktor yang dipandang berperan dalam menentukan arah hubungan yang terjadi di antara kedua negara tersebut. Selain itu, penelitian ini menerapkan pendekatan historis dan politis dalam upaya memahami dinamika hubungan Indonesia dan Australia.

4. Pembahasan dan Analisis

IA-CEPA

Indonesia dan Australia menandatangani perjanjian IA-CEPA pada 4 Maret 2019. Penandatanganan itu kemudian diperkuat oleh ratifikasi perjanjian ini pada 26 November 2019 oleh Parlemen Australia. Sedangkan, parlemen Indonesia meratifikasinya pada 6 Januari 2020. Perjanjian ini mulai berlaku pada 5 Juli 2020. Pemberlakuan IA-CEPA menandai tonggak penting dalam hubungan ekonomi kedua negara. Melalui IA-CEPA, kedua negara menciptakan kerangka kerja untuk mencapai potensi penuh dari kemitraan ekonomi bilateral mereka. Perjanjian ini terdiri dari 21 bab yang meliputi perdagangan barang dan jasa, investasi, perdagangan elektronik, dan isu perdagangan spesifik lainnya (Patunru et al., 2021: 8).

Perjanjian IA-CEPA menjadi contoh nyata bagaimana konsep pluralisme liberal berperan dalam pembentukan dan penerapan kebijakan luar negeri. Konsep pluralisme liberal menyatakan bahwa kekuasaan tidak berpusat pada satu aktor, tetapi terbagi di antara berbagai aktor dan lembaga pemerintah. Perjanjian ini juga memengaruhi hubungan bilateral kedua negara.

Sesuai namanya yang menyertakan kata '*Comprehensive*', CEPA melampaui kategori perjanjian *Free Trade Agreement* (FTA) yang berfokus pada penghapusan tarif dan regulasi investasi asing. CEPA juga

berbeda dari sekadar *Economic Partnership Agreement* (EPA) yang meliputi pergerakan bebas, persaingan internasional, prosedur bea cukai, dan penyelesaian sengketa. CEPA menjadi sebetulnya perjanjian kerja sama yang menghubungkan akses pasar, pengembangan kapasitas, dan fasilitas perdagangan serta investasi. Kerja sama ini dapat dieksekusi secara bilateral atau melalui blok kerja sama. Kerja sama dalam CEPA berlandas pada keyakinan saling menguntungkan dan menguatkan ekonomi para pemangku kepentingan dalam perjanjian tersebut (Rusmin et al., 2021: 137).

Perjanjian IA-CEPA tercapai setelah melalui proses yang panjang dan diupayakan oleh berbagai pihak dari Indonesia dan Australia. Perjanjian ini bermula dari penyelenggaraan forum dialog bisnis antara Indonesia dan Australia pada 2005. Dalam forum ini, Presiden Indonesia ketika itu, Susilo Bambang Yudhoyono, berbicara tentang potensi manfaat dari perluasan hubungan bisnis kedua negara melalui prioritas pada perdagangan jasa untuk memacu pertumbuhan di sektor kesehatan dan pendidikan. Perdana Menteri Australia John Howard kemudian menanggapi usulan ini dengan menyatakan kesediaannya membentuk kemitraan ekonomi komprehensif.

Meski inisiatif awal perjanjian IA-CEPA berasal dari dua pemimpin eksekutif Indonesia dan Australia, kerja-kerja untuk mewujudkan dan melaksanakan perjanjian ini terbagi ke beberapa aktor selain eksekutif, masyarakat, dan parlemen. Salah satu aktor penting dalam perundingan IA-CEPA dari masyarakat adalah *Indonesia-Australia Business Partnership Group* (IA-BPG). Kelompok ini terdiri dari berbagai pemangku kepentingan bisnis dari kedua negara. Pembentukannya bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan kolaborasi antara sektor swasta Indonesia dan Australia. IA-BPG bertugas memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang cara-cara untuk

meningkatkan kerja sama ekonomi dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh IA-CEPA.

IA-BPG berperan dalam mengidentifikasi dan mengusulkan proyek percontohan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan sektor pertanian, seperti konsumsi daging merah dan buah tropis di Australia, serta pengembangan tenaga kerja terampil di Indonesia. Keterlibatan IA-BPG menunjukkan bagaimana sektor swasta dapat berkontribusi dalam perundingan perdagangan internasional dengan menawarkan perspektif praktis dan solusi yang dapat diimplementasikan.

Kesepakatan IA-CEPA pada 2019 tercapai setelah melalui 12 putaran perundingan yang dimulai sejak 2013. Namun, putaran pertamanya yang dimulai pada 26-27 September 2012 dan berakhir pada 26-27 Maret 2013 di Jakarta masuk kategori terpisah dari total 12 putaran perundingan. IA-BPG berperan dalam perundingan pertama antara 2012 sampai 2013 dengan menekankan fokus pada poin-poin peningkatan kapasitas Indonesia dalam bidang keterampilan dan pertanian.

Perundingan IA-CEPA sempat tersendat dari November 2013 hingga Februari 2016 karena kasus penyadapan intelijen Australia terhadap pejabat Indonesia termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai bentuk protes, Indonesia menarik duta besarnya dan membekukan sejumlah kerja sama bilateral dengan Australia seperti kerja sama militer dan pembelian peternakan sapi. Meski hubungan kedua negara mengalami ketegangan, upaya menurunkan ketegangan juga muncul pada saat bersamaan dari kedua pihak yang berkepentingan terhadap membaiknya hubungan Indonesia-Australia.

Australia menilai kelanjutan perundingan IA-CEPA penting untuk memperkuat posisinya di kawasan Pasifik di tengah konstelasi ekonomi global yang bergerak dengan cepat. Bagi Australia,

Indonesia yang memiliki populasi lebih dari 270 juta jiwa adalah pasar potensial untuk produk dan jasa. Bila perundingan berjalan lancar dan tercapai, Australia memprediksi akan ada peningkatan ekspor produk pertanian, pendidikan, dan layanan keuangan ke Indonesia (Murtasidin, 2021: 55).

Sebaliknya, bagi Indonesia, bila perundingan terus berjalan, maka akan mendekatkan investasi asing langsung dari Australia. Pelaku bisnis memprediksi kesepakatan IA-CEPA akan memberikan kerangka kerja yang lebih stabil dan transparan bagi investor asing. Pada akhirnya, mereka berharap investor Australia tergerak untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Investasi ini tidak hanya akan meningkatkan aliran modal ke dalam negeri tetapi juga akan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Selain itu, Indonesia menganggap perjanjian ini kelak dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan program pertukaran pelajar dan pelatihan yang disediakan oleh Australia. Ini sejalan dengan upaya Indonesia untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Dari segi pertahanan dan keamanan, Indonesia juga menilai IA-CEPA dapat memperkuat hubungan bilateral dan mendukung stabilitas regional.

Dengan demikian, bagi kedua negara, IA-CEPA tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memperkuat posisi strategis mereka di kawasan Asia Tenggara dan Pasifik. Karena itulah, kedua negara melanjutkan perundingan tersebut pada 2016. Dalam putaran keempat ini, kedua negara menyepakati beberapa hal terkait pendekatan masing-masing dalam bidang barang dan jasa, serta investasi hingga adanya peningkatan fokus terhadap isu kebijakan *e-commerce* dan persaingan perdagangan lintas sektoral.

Keduanya sepakat bahwa IA-CEPA akan semudah mungkin digunakan untuk memfasilitasi perdagangan. Hasil putaran juga memperkuat pelibatan para pelaku usaha untuk mencari masukan dan memperluas informasi serta pertimbangan kepada pemangku kepentingan.

Setelah melalui 12 putaran perundingan yang dimulai sejak 2013, Indonesia dan Australia menyepakati IA-CEPA pada 2019. Parlemen dua negara berperan dalam meratifikasi perjanjian ini. DPR Indonesia juga menguatkan perjanjian ini lewat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Pelaksanaan perjanjian berlaku mulai pada Juli 2020 dan mutlak melibatkan aktor selain pemerintah seperti lembaga pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pebisnis swasta. Melalui pelibatan aktor pelaksana selain pemerintah, kedua negara menilai IA-CEPA dapat mempercepat kerja sama ekonomi di semua tingkatan, yaitu bisnis, komunitas, dan individu. Dengan demikian, pihak-pihak tersebut mempunyai kekuasaan dalam lingkungannya masing-masing untuk menjalankan perjanjian tersebut.

Pelaksanaan *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) langsung berhadapan dengan situasi tidak terduga, yaitu Pandemi COVID-19. Pada 11 Maret 2020, *World Health Organization* menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Seperti negara lain di dunia, kedua negara mengalami guncangan ekonomi akibat pandemi (Nuranisa & Paksi, 2022: 194).

Sektor pariwisata, perdagangan, transportasi, dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) yang sebelumnya menyumbang besar angka Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, bergerak lambat menyusul penerapan pembatasan sosial berskala besar. Australia juga harus memilih antara pengendalian virus dengan kuncitara wilayah yang berakibat melambatnya aktivitas ekonomi atau menjaga aktivitas perekonomian

dengan risiko penyebaran virus yang lebih luas.

Situasi pandemi ternyata menegaskan posisi signifikan IA-CEPA. Kedua negara berada dalam resesi ekonomi yang tajam. Ekonomi mereka membutuhkan tindakan-tindakan perbaikan. IA-CEPA menjadi salah satu kesempatan untuk memperbaiki ekonomi mereka. Mereka melihat kerja sama IA-CEPA dapat membantu keduanya pulih dari resesi ekonominya dengan program-program yang ditawarkannya dalam berbagai sektor yang terdampak COVID-19.

Melalui penerapan perjanjian IA-CEPA di bidang investasi dan ekonomi, barang dan jasa, serta pengembangan sumber daya manusia, Indonesia dan Australia memulihkan ekonominya secara bertahap. IA-CEPA juga berhasil meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan tenaga kerja Indonesia melalui program pertukaran keterampilan timbal balik, pelatihan kerja di tempat kerja, serta aturan visa bekerja dan liburan (Nuranisa & Paksi, 2022: 200)

Setelah masa pandemi, kedua negara melanjutkan penerapan kerja sama tersebut. Tantangan utama penerapannya adalah perbedaan kebijakan dan regulasi di kedua negara, sedangkan peluangnya adalah memanfaatkan posisi mereka untuk saling melengkapi dalam pengembangan berbagai sektor strategis, seperti pangan dan industri kreatif. Melihat perkembangan IA-CEPA melewati pandemi COVID-19, kerja sama ini masih mempunyai peluang mempererat hubungan ekonomi Indonesia dan Australia pada masa Prabowo-Albanese dengan tetap melibatkan berbagai aktor di luar pemerintah.

Middle Powers

Konsep *middle powers* menempati posisi penting untuk memahami dinamika dan potensi kerja sama Indonesia dan Australia. Perbedaan sejarah, budaya, dan identitas antara Indonesia dan Australia tidak mencegah keduanya saling berinteraksi secara erat karena

posisi geografis mereka berdekatan. Meski berbeda dalam banyak hal, Indonesia dan Australia memiliki posisi yang sama di konstelasi peta dunia, yaitu posisi sebagai *middle power*. Posisi ini memungkinkan Indonesia dan Australia turut berperan dalam tatanan internasional dan memberdayakan posisi strategisnya untuk menentukan arah kebijakan luar negeri mereka.

Middle powers merupakan istilah untuk merujuk pada negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan strategis yang substansial. Mereka tidak sekuat negara adidaya (*super power*), tapi juga tidak bisa dibilang lemah seperti negara *small powers*. Negara *middle powers* kerap menjalankan diplomasi multilateral sebagai senjata utama dan berperan penting dalam organisasi internasional untuk meningkatkan pengaruh mereka.

Indonesia, misalnya, terus berusaha mengambil keterlibatan yang besar dalam forum-forum multilateral seperti ASEAN dan G20. Indonesia juga berambisi menjadi penyeimbang antara kepentingan kekuatan besar dan negara-negara kecil di kawasan Asia Tenggara (Beeson & Lee, 2015 dalam Roberts, Habir, & Sebastian (Eds.): 224). Di kawasan Indo-Pasifik, status *middle power* Indonesia didukung oleh posisinya sebagai negara dengan PDB terbesar di Asia Tenggara pada 2023 dan kepemimpinan aktif dalam ASEAN sejak didirikan pada 1967.

Sesuai dengan dokumen *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) 2019, Indonesia menggunakan posisinya sebagai *middle power* dengan pendekatan reformis-kantian. Pendekatan ini menekankan pada keseimbangan dinamis dan keterlibatan kooperatif yang non-kompetitif di lingkup regional. Pendekatan ini bertujuan membangun jaringan yang melibatkan semua pemangku kepentingan regional, termasuk AS dan China, dan mendorong kerja sama multilateral di bawah kerangka ASEAN. Pendekatan ini menyerukan kerja sama untuk

melawan dominasi kekuatan besar dan kompetisi yang bersifat *zero-sum* (Harijanto, 2024: 52).

Sementara Australia, sebagai salah satu ekonomi terdepan di dunia, memiliki karakteristik yang mendukung posisi mereka sebagai *middle power*. Berbeda dari Indonesia, Australia menggunakan statusnya sebagai *middle power* dengan pendekatan *status-quoist/Lockean*. Pendekatan ini cenderung menempatkan tatanan liberal internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat sebagai cantolan utamanya untuk menghadapi bangkitnya China (Harijanto, 2024: 53-54)

Berdasarkan dokumen *2017 Foreign Policy White Paper* dan *2023 National Defence: Defence Strategic Review*, Australia merancang strategi yang berorientasi pada pertahanan dan penguatan aliansi dengan negara-negara besar lainnya. Australia cenderung memelihara keberlanjutan dan stabilitas melalui struktur dan prinsip yang ada.

Perspektif ini mencerminkan pandangan Australia tentang pentingnya menjaga koalisi dan arsitektur keamanan yang sudah mapan. Perspektif ini terjawab dalam hubungan Australia dengan kekuatan besar melalui aliansi pertahanan strategis seperti AUKUS (Australia, United Kingdom, dan United States) dan dialog regional seperti *Quadrilateral Security Dialogue*, dua koalisi yang menunjukkan komitmen tinggi Australia dengan sekutu-sekutu kuatnya dalam menghadapi tantangan regional seperti kebangkitan China.

Pendekatan *status-quoist* dan aliansi erat Australia dengan negara-negara besar dapat bersinggungan dengan pendekatan reformis dan kantian yang diambil Indonesia. Meski begitu, tetap mungkin mempertemukan dua pendekatan yang berbeda ini. Peluang untuk memproyeksikan pengaruh *middle powers* tidak sepenuhnya bergantung pada satu pendekatan. Konsultasi dan kerja sama regional dalam menghadapi isu internasional,

seperti ketegangan dengan China, memberikan kesempatan bagi kedua negara untuk memperkuat kerja sama.

Mirip dengan Indonesia, Australia menginginkan keterlibatan yang mendalam melalui diplomasi multilateral. Australia dikenal sebagai promotor aktif dari nilai-nilai *middle power* dan bersedia terlibat dalam diplomasi multilateral. Secara kepentingan geografis dan struktural tatanan internasional, Indonesia dan Australia memiliki kemiripan. Secara struktural, kedua negara melihat ancaman terhadap keamanan dalam konteks regional yang lebih luas, termasuk kekhawatiran terhadap ekstremisme agama.

Kolaborasi Indonesia dan Australia dalam isu-isu keamanan, seperti dalam memerangi ekstremis agama setelah peristiwa Bom Bali 2002, bukti kerja sama berdasarkan kepentingan struktural. Indonesia dan Australia memiliki kepentingan yang serupa dalam menjaga stabilitas regional dan mencegah penyebaran ideologi ekstrem yang dapat mengancam keamanan domestik dan regional.

Indonesia dan Australia telah sepakat pada berbagai kerja sama strategis untuk mengatasi isu-isu keamanan maritim dan terorisme. Kesepakatan ini diantaranya adalah deklarasi bersama tentang kerja sama maritim yang diteken pada 2017 dan rencana aksi untuk implementasinya pada tahun berikutnya, yang memperlihatkan komitmen kedua *middle powers* ini dalam mempromosikan keamanan regional (Hanggarini et al., 2023: 1).

Selain itu, bersama perubahan dinamika kekuasaan global, Indonesia dan Australia, sebagai *middle powers*, mempunyai peluang untuk memperkuat perannya. Kedua belah pihak dapat bekerja sama dalam menciptakan kebijakan kreatif untuk menghadapi tantangan di Indo-Pasifik, terutama dalam konteks keamanan regional yang membantu memitigasi ketegangan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China.

Dari segi kepentingan geografis, Indonesia dan Australia dihubungkan oleh laut sebangun 200 km pada titik terdekatnya. Keberadaan geografis ini bukan hanya memberikan kedekatan fisik, tetapi juga menempatkan kedua negara di posisi strategis dalam jalur perdagangan maritim internasional. Laut yang menghubungkan keduanya adalah jalur penting untuk perdagangan dan transportasi energi bagi kedua negara serta bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik. Posisi geografis ini menciptakan kebutuhan bagi Australia dan Indonesia untuk mengamankan jalur perairan tersebut dari ancaman seperti kejahatan maritim dan ekstremisme (Beeson et al., 2021: 178-180).

Kesepakatan IA-CEPA juga menjadi bukti perbedaan dua pendekatan *middle power* Indonesia dan Australia dapat bertemu dan saling melengkapi. Perjanjian ini membuka akses pasar bebas tarif dan meningkatkan pertukaran investasi, menciptakan kerangka panjang untuk kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

Dari sisi pertahanan, prospek perjanjian kerja sama tersebut mengalami peningkatan dengan adanya prakarsa baru untuk memperluas cakupan latihan militer bersama dan pengembangan teknologi pertahanan. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keamanan kawasan, tetapi juga menunjukkan kemampuan *middle powers* untuk meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang strategis.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pertahanan (*Defence Cooperation Agreement/DCA*) antara Indonesia dan Australia menandai langkah signifikan dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang berperan sebagai *middle powers*. Menteri Pertahanan Republik Indonesia kala itu, Prabowo Subianto, bersama dengan *Deputy Prime Minister* sekaligus Menteri Pertahanan Australia, *The Hon* Richard Donald Marles *M.P.*, merealisasikan perjanjian ini di Aula

Graha Utama, Akademi Militer, Magelang, pada 29 Agustus 2023.

Penandatanganan DCA boleh dibilang sebagai tonggak bersejarah yang melanjutkan semangat dari perjanjian sebelumnya, yakni Perjanjian Lombok, dengan fokus pada peningkatan kerja sama untuk mengatasi berbagai ancaman keamanan dan mempromosikan perdamaian serta stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Prabowo Subianto menegaskan pentingnya hubungan erat dan persahabatan dengan Australia. Ia berjanji akan memelihara dan memperkuat hubungan itu pada masa mendatang. Reaksi hangat juga muncul dari Australia. Mereka mengakui bahwa DCA merupakan perjanjian pertahanan yang paling signifikan dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 29 Agustus 2024).

Dengan demikian, konsep *middle power* yang nyaris serupa, tetapi dengan pendekatan yang berbeda ternyata tidak menghalangi Indonesia dan Australia menjalin kerja sama yang lebih erat. Keduanya menyadari posisinya sebagai mitra politik, pertahanan serta keamanan, dan ekonomi yang saling menguatkan. Berangkat dari sini, kolaborasi strategis dapat dirancang untuk memanfaatkan perubahan geopolitik di Indo-Pasifik pada masa Prabowo dan Albanese.

Prabowo, dengan visi pertahanan yang kuat, dapat mendorong dialog pertahanan yang lebih intensif dan teknis dengan Australia, terutama dalam menghadapi ancaman keamanan maritim dan menanggapi perkembangan geopolitik regional. Ia juga kerap berulang kali menyatakan akan setia dengan garis politik luar negeri bebas aktif yang non-blok, tetapi tetap menjaga hubungan baik dengan China dan Amerika Serikat (The Jakarta Post, 20 Agustus 2024).

Sedangkan Albanese, sebagai Perdana Menteri Australia yang melanjutkan kebijakan luar negeri yang condong pada aliansi besar, tetapi di saat yang sama terbuka pada

pendekatan multilateral, akan mengupayakan persinggungan dengan Indonesia dalam beberapa isu internasional dan regional. Ia juga kemungkinan akan mengambil jalan yang ditempuh oleh partainya, Partai Buruh, yang mengedepankan prinsip keterbukaan dan kerja sama yang menguntungkan semua pihak, tidak membentuk aliansi secara sempit, bahkan hingga mengalienasi atau mengasingkan negara tertentu (CSIS Media Briefing, 16 Juni 2022).

Indonesia dan Australia memiliki peluang untuk mengembangkan kebijakan kreatif yang turut memajukan kepentingan nasionalnya masing-masing, sekaligus menguntungkan keduanya dan kawasan Asia-Pasifik dan Asia Tenggara. Pendekatan diplomasi yang lebih aktif serta kerja sama yang lebih erat di bidang ekonomi dan keamanan dapat menjadi landasan bagi hubungan kedua negara yang lebih baik pada masa depan.

Opini Publik

Opini publik memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri di Indonesia dan Australia. Opini publik adalah pandangan atau sikap kolektif masyarakat terhadap isu-isu tertentu yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri. Meskipun, kerap dipandang sebagai elemen yang tidak stabil, opini publik dapat berperan signifikan dalam mengarahkan kebijakan pemerintah.

Opini publik didefinisikan sebagai pandangan kolektif sejumlah besar individu yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan atau isu yang dijadikan objek penilaian. Opini publik sering dianggap berubah-ubah dan tidak terartikulasi dengan baik, namun tetap menjadi sumber dukungan potensial bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

Dalam dunia yang semakin terhubung, perhatian publik terhadap isu seperti hak asasi manusia, ekonomi, sosial, budaya, dan politik

dapat mendorong pemerintah untuk menanggapi konflik atau situasi tertentu secara lebih efektif. Opini publik terbentuk dan terpengaruh oleh berbagai faktor seperti media, pengalaman pribadi, dan wacana politik, serta mencerminkan aspirasi dan kekhawatiran Masyarakat (Chubb & Macallister, 2021: 3).

Indonesia dan Australia telah lama memiliki hubungan bilateral yang kompleks dan sering kali pasang-surut atau *'roller coaster'*. Persepsi publik dan media di Australia, khususnya terhadap Indonesia, punya tempat khusus di tengah perkembangan hubungan ini. Sejarah hubungan Australia dengan negara-negara Asia, termasuk Indonesia, diwarnai oleh ketidakpercayaan dan kekhawatiran terhadap kebijakan luar negeri negara-negara besar. Pasca Perang Dunia II, Australia membentuk aliansi pertahanan yang lebih dekat, seperti ANZUS, dengan Amerika Serikat demi mengamankan posisi strategisnya.

Survei menunjukkan bahwa masyarakat Australia pada umumnya mendukung keterlibatan Australia dalam aliansi pertahanan dengan negara besar seperti Amerika Serikat. Sementara, perjanjian dan hubungan dengan negara tetangga Asianya justru mendapat skeptisisme. Ketika Indonesia pertama kali menginvasi Timor Timur pada 1975, reaksi publik Australia beragam. Sebagian besar tidak sepakat dengan pendudukan tersebut.

Data survei Morgan Gallup Poll pada Februari 1976 memperlihatkan bahwa sebanyak 50% responden menentang pendudukan Indonesia di Timor Timur, sementara hanya 15% yang mendukung. Sisanya, sebesar 35%, mengaku tidak punya sikap jelas soal ini. Namun, pemerintah Australia di bawah Gough Whitlam cenderung menyetujui invasi ini. Perhatian publik terhadap Timor Timur berangsur menurun hingga kebangkitan gerakan advokasi internasional pada 1990-an yang

memperbaharui minat dan dukungan untuk penentuan nasib sendiri di Timor Timur.

Pada akhir dekade 1990-an, Pemerintah Howard melakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan Australia terhadap Timor Timur. Opini publik mulai selaras dengan keinginan untuk mendukung upaya kaum Timor Timur dalam mencapai penentuan nasib sendiri. Langkah ini ditandai dengan peningkatan tekanan dari Australia kepada kepemimpinan Indonesia untuk mengadakan referendum, yang akhirnya terjadi pada 30 Agustus 1999 dengan persetujuan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) (Chubb & Macallister, 2021: 106-107).

Opini publik Australia terhadap Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh masalah Timor Timur, tetapi juga oleh ancaman terorisme. Setelah serangan bom Bali pada 2002, pandangan publik Australia tentang keamanan berubah, meningkatkan persepsi negatif terhadap Indonesia sebagai sumber ancaman. Opini publik di Australia sering kali terbentuk melalui persepsi keamanan terkait isu-isu seperti terorisme dan ancaman militer. Sebagai contoh, sekitar 54% orang Australia percaya bahwa Indonesia merupakan ancaman militer pada 2013 (Roberts & Habir, 2015: 205).

Data survei dari ANUpoll pada tahun 2014 menggambarkan bahwa masyarakat Australia umumnya melihat Indonesia sebagai negara yang 'ramah, namun bukan sekutu'. Hanya 16% yang menganggap Indonesia sebagai sekutu, sementara 55% menganggapnya ramah, namun bukan sebagai sekutu penuh. Hanya sebagian kecil yang melihat Indonesia sebagai musuh (3%).

Masyarakat Australia, sebagaimana terlihat dalam berbagai survei, secara umum skeptis terhadap sistem politik Indonesia, tetapi menyadari pentingnya ekonomi Indonesia bagi Australia. Ini menunjukkan bahwa meski ada keraguan tentang demokrasi di Indonesia, masyarakat Australia mengakui Indonesia punya nilai ekonomi. Opini

masyarakat Australia yang kurang suka terhadap aspek-aspek tertentu dari hubungan Australia-Indonesia telah mendorong pemerintahnya untuk lebih berhati-hati dalam merancang kebijakan bilateral.

Tak berbeda jauh dengan masyarakat Australia, masyarakat Indonesia juga kerap mencurigai dan tidak percaya dengan niat Australia. Sebagian masyarakat Indonesia masih percaya bahwa Australia mempengaruhi kemerdekaan Timor Leste dan memiliki agenda di Papua Barat. Pengalaman kasus penyadapan dan kegiatan mata-mata Australia terhadap Presiden SBY dan pejabat Indonesia pada 2013 ikut menciptakan citra buruk Australia di masyarakat Indonesia (Roberts & Habir, 2015: 217).

Karena itulah, Pemerintah Indonesia dan Australia berupaya meningkatkan persepsi positif hubungan keduanya melalui kerja sama pendidikan dan budaya, serta peningkatan keterlibatan pemerintah dalam forum internasional bersama Australia. Upaya ini menunjukkan hasil positif. Berdasarkan survei EY Sweeney untuk *Australia-Indonesia Centre* (AIC) pada 2022, sebanyak 74% responden Indonesia merasa memiliki pemahaman yang baik atau sedang mengenai Australia, dan 87% menyatakan sikap positif terhadap Australia (Department of International Relations Faculty of Psychology and Socio-Cultural Sciences, 6 Mei 2022).

Namun, keinginan untuk mendalami Australia lebih lanjut masih minim. Hal ini karena aspek sejarah, budaya, dan politik Australia dinilai kurang menarik oleh masyarakat Indonesia. Sebagian besar ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap Australia lebih didorong oleh peluang pendidikan dan pekerjaan.

Sebaliknya, dari responden Australia, terdapat 53% yang merasa memiliki pengetahuan yang baik atau sedang tentang Indonesia dan hanya 43% yang memiliki sikap positif terhadap Indonesia. Hal ini mungkin disebabkan oleh penurunan program studi

bahasa Indonesia di universitas-universitas Australia serta stereotip yang mempersepsikan Indonesia secara negatif.

Dari hasil opini publik itu, kunci meningkatkan hubungan bilateral kedua negara terletak pada pemahaman dan kesadaran posisi masing-masing negara. Bagi Indonesia, peningkatan studi tentang Australia sebaiknya tidak hanya berfokus pada destinasi wisata, pekerjaan, dan pendidikan. Sebaliknya, program studi terkait Australia dapat menjadi prioritas. Bagi Australia, penting untuk menyingkirkan stereotip kaku terhadap Indonesia dan meningkatkan eksposur warga Australia terhadap budaya dan sejarah Indonesia.

Dengan perubahan kekuatan ekonomi dan politik di kawasan, intensifikasi hubungan Indonesia-Australia semakin penting. Indonesia diperkirakan akan menjadi mitra yang lebih dominan dan keterlibatan Australia akan sangat bergantung pada dukungan Indonesia dalam menjaga kepentingan bersama.

5. Kesimpulan

Prospek hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia pada masa Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Albanese berpotensi lebih erat berdasarkan hasil dari pemerintahan sebelumnya. Keduanya dapat meneruskan kerja sama dalam tiga ranah utama: ekonomi, keamanan, dan persepsi publik. Melalui perjanjian IA-CEPA yang didasarkan pada pluralisme liberal, kedua negara menciptakan mekanisme kerja sama yang lebih komprehensif dalam bidang perdagangan dan investasi. Kesepakatan ini tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi bilateral, tetapi juga menandai era baru dalam hubungan ekonomi dengan melibatkan aktor dari berbagai sektor.

Dalam posisi sebagai *middle powers*, Indonesia dan Australia memiliki potensi besar

untuk berkontribusi pada stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Posisi ini memungkinkan mereka untuk mengadopsi pendekatan diplomatik yang fleksibel dan terlibat dalam kerja sama multilateral. Keduanya dapat mempromosikan nilai-nilai stabilitas regional tanpa harus tunduk pada dominasi kekuatan besar. Dengan pendekatan yang berbeda, reformis dari Indonesia dan *status quo* dari Australia, kedua negara dapat saling melengkapi dalam perumusan kebijakan regional yang responsif terhadap perubahan geopolitik.

Peran opini publik juga tidak dapat diabaikan dalam membangun fondasi hubungan jangka panjang yang lebih kokoh. Sikap positif masyarakat terhadap negara tetangga merupakan aset yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri. Meski masih ada stereotip negatif di kalangan masyarakat Australia dan Indonesia, survei terbaru menunjukkan adanya peningkatan sikap positif di kedua negara. Meningkatnya pemahaman publik akan pentingnya hubungan bilateral, terutama di kalangan generasi muda, akan menjadi kunci untuk mengikis prasangka dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam di kedua belah pihak.

Pada akhirnya, hubungan Indonesia-Australia di bawah kepemimpinan Prabowo dan Albanese berpotensi semakin solid dengan landasan ekonomi yang kokoh, kemitraan strategis dalam keamanan regional, serta dukungan dari opini publik yang semakin positif.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

Beeson, M., & Lee, W. 2015. *The Middle Power Moment: A New Basis for Cooperation between Indonesia and Australia?*, in C. B. Roberts, A. D. Habir, & L. C. Sebastian (Eds.), *Indonesia's ascent* (Critical Studies of the Asia Pacific Series). London:

Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9781137397416_11.

Chubb, D., & Macallister, I. 2021. *Australian public opinion, defence, and foreign policy: Attitudes and trends since 1945*. Singapore: Palgrave Macmillan.

Kitley, P., Chauvel, R., & Reeve, D. 1989. *Australia di mata Indonesia: Kumpulan artikel pers Indonesia 1973—1988*.

Roberts, C. B., & Habir, A. D. 2015. *Indonesia-Australia relations: Progress, challenges and potential*, in C. B. Roberts, A. D. Habir, & L. C. Sebastian (Eds.), *Indonesia's ascent* (hal 195–223). London: Palgrave Macmillan.
https://doi.org/10.1057/9781137397416_10.

Steans, J., & Pettiford, L. 2009. *Hubungan internasional: Perspektif dan tema*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Acuan artikel dalam jurnal:

Beeson, M., Bloomfield, A., & Wicaksana, W. 2021. "Unlikely allies? Australia, Indonesia and the strategic cultures of middle powers", dalam *Asian Security*, 17(2), 178-194.
<https://doi.org/10.1080/14799855.2020.1846525>.

Hanggarini, P., Madjid, M. A., Perwita, A. A. B., & Wiranto, S. 2023. "The development of middle powers interaction: Australia-Indonesia bilateral relations", dalam *Multidisciplinary Reviews*, 6(4), 2023041.
<https://doi.org/10.31893/multirev.2023041>.

Harijanto, C. 2024. "Middle-power behaviours: Australia's status-quoist/Lockean and Indonesia's reformist/Kantian approaches to crises

- of legitimacy in the Indo-Pacific”, dalam *Australian Journal of International Affairs*, 78(1), 40-57. <https://doi.org/10.1080/10357718.2023.2283473>.
- Murtasidin, B. 2021. “Kepentingan ekonomi politik Indonesia dalam kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Australia”, dalam *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 4(1), 52-63. <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1726>.
- Nuranisa, S. A., & Paksi, A. K. 2022. “Peran strategis kerjasama IA-CEPA terhadap pemulihan ekonomi Indonesia di masa pandemi COVID-19”, dalam *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*, 6(2), 192-202. <https://doi.org/10.23887/jppsh.v6i2.47310>.
- Rusmin, J. H., Suryadi, A., & Abdullah, N. 2021. “Analisis proses perundingan kerja sama IA-CEPA (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) tahun 2013-2018”, dalam *Hasanuddin Journal of International Affairs*, 1(2), 137. <https://doi.org/10.20956/hujia.v1i2.2136>.
- Acuan artikel dalam website:**
- Antara News. 29 Agustus 2024. “Wakil PM Australia akan setuju perjanjian pertahanan dengan Indonesia”, dalam <https://www.antaranews.com/berita/4293507/wakil-pm-australia-akan-setujui-perjanjian-pertahanan-dengan-indonesia>, diakses 2 September 2024, pukul 10.05 WIB.
- Australian Embassy. 20 Mei 2024. “Kunjungan Gubernur Jenderal Australia ke Indonesia”, dalam <https://indonesia.embassy.gov.au/jaktin>
- [donesian/SM24_044.html](https://indonesia.embassy.gov.au/jaktin), diakses 2 September 2024, pukul 10:45 WIB.
- CSIS Media Briefing. 16 Juni 2022. “Proyeksi hubungan Indonesia-Australia di era kepemimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese”, dalam https://s3-csis-web.s3.amazonaws.com/event/file/Press_Release__Media_Briefing_HI.pdf, diakses 30 September 2024, pukul 20.30 WIB.
- Department of International Relations Faculty of Psychology and Socio-Cultural Sciences. 6 Mei 2022. “Between perceptions and realities of Australian-Indonesian attitudes: a view from Indonesia”, dalam <https://ir.uui.ac.id/publikasi/between-perceptions-and-realities-of-australian-indonesian-attitudes-a-view-from-indonesia/#:~:text=How%20Indonesian%20view%20Australia,be%20more%20knowledgeable%20about%20Australia>, diakses 2 September 2024, pukul 13.30 WIB.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 16 Mei 2024. “Saling beri dukungan, Indonesia – Australia mainkan peran penting di kawasan dan tingkat global”, dalam <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5774/saling-beri-dukungan-indonesia-australia-mainkan-peran-penting-di-kawasan-dan-tingkat-global>, diakses 2 September 2024, pukul 11:08 WIB.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 20 Agustus 2024. “Menhan Prabowo temui Perdana Menteri dan Menhan Australia di Canberra”, dalam

<https://www.kemhan.go.id/2024/08/20/menhan-prabowo-temui-perdana-menteri-dan-menhan-australia-di-canberra.html>, diakses 2 September 2024, pukul 13:25 WIB.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 29 Agustus 2024. “Menhan Prabowo tanda tangani perjanjian kerja sama pertahanan RI-Australia di Akmil Magelang”, dalam <https://www.kemhan.go.id/2024/08/29/menhan-prabowo-tanda-tangani-perjanjian-kerja-sama-pertahanan-ri-australia-di-akmil-magelang.html>, diakses 30 September 2024, pukul 03:37 WIB.

The Jakarta Post. 20 Agustus 2024. “Prabowo visits Australia holds meeting with Albanese”, dalam <https://www.thejakartapost.com/world/2024/08/20/prabowo-visits-australia-holds-meeting-with-albanese.html>, diakses 29 September 2024, pukul 21:40 WIB.

Acuan dari tugas akhir, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi:

Patunru, A., Surlanta, A., & Audrine, P. 2021. “Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement: Building the powerhouse (Policy Paper No. 33)”, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).